Bekasi Minta DKI Jakarta Cairkan Dana Kompensasi Bau Sampah

TPA Bantargebang (*sumber: indopas.co.id*)

Terjawab sudah penyebab keterlambatan pencairan dana kompenasi bau sampah yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) triwulan pertama bagi 18 ribu keluarga yang tinggal di tiga kelurahan di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman menerangkan bahwa keterlambatan pembayaran dana BLT karena Pemkot Bekasi memang baru saja mengusulkan. Total dana yang diusulkan mencapai sebesar Rp756 miliar.

Selain dana BLT untuk 18 ribu warga yang tinggal di tiga kelurahan di sekitar TPST Bantargebang, dana yang diajukan itu juga digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, sarana kesehatan, dan lainnya. Dana BLT tersebut dicairkan tiga bulan sekali.

Dari total dana kompensasi TPST Bantargebang yang mencapai Rp756 miliar, Sopandi mengaku bahwa terdapat Rp70 miliar yang dipergunakan untuk dana BLT. Biasanya, proses pencairan dana bau itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing warga dan tidak boleh diambil secara tunai.

Sopandi menambahkan, keterlambatan pengajuan dana hibah itu juga dipengaruhi oleh selesainya ketuk palu APBD DKI Jakarta 2019. Setelah anggaran disahkan, ada aturan yang jadi payung hukum terkait pencairan dana hibah. “Jadi harus berlandaskan hukum dana hibah yang diberikan ke Kota Bekasi”, papar Sopandi.

Sopandi menambahkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemakaian dana hibah untuk tahun anggaran 2018 sudah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta sehingga Pemkot Bekasi tinggal menunggu pencairan dana hibah tahun 2019 yang besarannya sudah disepakati.

Sebelumnya, dana kompensasi untuk ribuan warga yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang yang tak kunjung cair dipertanyakan warga. Dana tersebut masuk ke dalam program *Community Development* (CD) warga Bantargebang. "Dana program CD hanya untuk masyarakat Bantargebang. Seperti uang kompensasi bau sampah dan biaya sarana prasarana pembangunan wilayah tersebut", ujar Sopandi.

Seperti diketahui, sebanyak 18 ribu lebih keluarga di tiga kelurahan seperti Kelurahan Cikiwul, Sumurbatu, dan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang berhak atas kompensasi bau sampah. Setiap keluarga menerima Rp900 ribu yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Namun, warga hanya menerima Rp600 ribu karena Rp300 ribu dipakai untuk pembangunan infrastruktur, yang dananya dikelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setiap kelurahan. Mekanisme pencairan dana awalnya ditransfer ke rekening kas Pemkot Bekasi kemudian ditansfer ke rekening warga yang berhak.

Sementara itu, Koordinator Environment Community Union, Benny Tunggul mengatakan bahwa keterlambatan BLT untuk warga di sekitar TPST Bantargebang sudah menjadi rutinitas tiap tahun. Seharusnya, Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta memiliki mekanisme agar dana tersebut tidak terlambat. "Masalahnya ini soal perut, telat sedikit warga bisa ngamuk", kata Benny.

Benny juga mengatakan bahwa selama dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta, TPST Bantargebang kurang optimal. Mulai dari sisi pengelolaan sampah sampai ke manajerial keuangan untuk bantuan masyarakat. "Lihat saja pengelolaan sampahnya masih belum berubah, masih sama seperti dulu", tandas Benny.

Sumber Berita:

1. indopos.co.id, *Anggaran Kompensasi Bau Sampah Baru Diusulkan*, 9 April 2019;
2. sindonews.com, *Bekasi Minta DKI Cairkan Dana Kompensasi Bau Sampah*, 10 April 2019;
3. tribunnews.com, *Bekasi Menunggu Dana Kompensasi Sampah Bantargebang, Prediksi Dana Kemitraan DKI Cair Juli 2019*, 25 Juni 2019.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  a) Relokasi;
  b) Pemulihan lingkungan;
  c) Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  d) Kompensasi dalam bentuk lain.

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau *cash transfers* adalah program bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*), maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*).

  Di Indonesia, program BLT pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2005.

  Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005, program BLT tidak bersyarat diselenggarakan pada Oktober 2005 sampai dengan Desember 2006 dengan target sebanyak 19,2 juta keluarga miskin.

  Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008, program BLT tidak bersyarat kembali diselenggarakan pada tahun 2008.

  Pada tahun 2013, Pemerintah kembali menyelenggarakan BLT, namun dengan nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, yaitu dengan membagikan uang tunai masing-masing sebesar seratus ribu rupiah perbulan kepada sebanyak 18,5 juta keluarga miskin.

- Berdasarkan beberapa teori, *community development* atau pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik.

Program *community development* memiliki tiga karakter utama yaitu:

a) Berbasis masyarakat (*community based*);
b) Berbasis sumber daya setempat (*local resource based*); dan
c) Berkelanjutan (*sustainable*).

Dua sasaran yang ingin dicapai dari program *community development* adalah sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan.

Sasaran kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) dengan tujuan agar:

a) Anggota masyarakat atau institusi penunjang dapat ikut dalam proses produksi;
b) Kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian;
c) Keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kerjasama (*cooperation*) dapat berjalan secara simultan.